



**TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN NASIONAL
DALAM MEMBANGUN KECERDASAN DAN
JATI DIRI KEHIDUPAN BANGSA**

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN NASIONAL DALAM MEMBANGUN KECERDASAN DAN JATI DIRI KEHIDUPAN BANGSA

Profesor Sunaryo Kartadinata

*Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
Ketua II Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan
Konseling Indonesia
Ketua Majelis Eksekutif Asosiasi Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan Indonesia*

Esensi *mencerdaskan kehidupan bangsa* yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah membangun bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan kuat di dalam percaturan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan memperbaiki serta mengubah dan memulihkan perilaku “sakit” yang tidak menguntungkan kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat yang waras (*sane society*) sebagai masyarakat yang beriman, demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan.

A. Beberapa Persoalan Strategis

Di antara berbagai persoalan pendidikan nasional yang sampai saat ini terus menjadi perhatian para ahli dan pemikir pendidikan di tanah air, khususnya para ahli pendidikan yang terhimpun dalam organisasi profesi Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), adalah perlunya Pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, bersama seluruh komponen bangsa untuk secara terus menerus melakukan berbagai upaya yang bersifat strategis.

Pemikiran para ahli pendidikan dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. *Upaya-upaya konseptual-filosofis* untuk mengelaborasi lebih jauh prinsip-prinsip pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni; pembangunan watak dan peradaban bangsa; paradigma pendidikan yang mencerdaskan bangsa; paradigma pendidikan yang demokratis dan berkeadilan; paradigma pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan; paradigma pendidikan sistemik yang terbuka dan multimakna; paradigma pendidikan yang memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas; paradigma pendidikan yang mengembangkan budaya dan paradigma pendidikan dengan memberdayakan masyarakat.
2. *Kegiatan-kegiatan*: penelitian keilmuan pendidikan; penelitian pendidikan disiplin ilmu; penelitian kebijakan pendidikan; penelitian pendidikan untuk pembangunan nasional dan /atau daerah; penelitian pendidikan berbasis jaringan; penelitian dan pengembangan melalui sekolah-sekolah percobaan (seperti *lab school*); penelitian pendidikan keagamaan; monitoring serta evaluasi proyek-proyek pendidikan; dan kemitraan penelitian dengan luar negeri;
3. *Kemauan politik yang kuat dari seluruh komponen bangsa* untuk mewujudkan pendidikan untuk pengekalan persatuan dan kesatuan bangsa; pendidikan dalam rangka alih generasi; masalah gender dalam pendidikan; partisipasi politik pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; peran asosiasi profesi kependidikan; dan pendidikan nasional dalam rangka peningkatan daya saing bangsa dalam konteks globalisasi yang memungkinkan dibangunnya masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan dan teknologi (*knowledge-based society*).
4. *Pengembangan strategi dan skenario* yang sistematis dan sistemik untuk mewujudkan standar nasional pendidikan (standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan); melakukan penjaminan mutu pendidikan nasional; mengembangkan profil badan standardisasi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;

dan mengembangkan konsep standar pendidikan yang dinamis; serta meningkatkan fungsi dan peran lembaga penjaminan mutu pendidikan daerah.

5. *Upaya untuk mengelaborasi lebih jauh* konsep dan operasionalisasi diversifikasi kurikulum; pengembangan silabus pada tingkat kabupaten/kota; fungsi dan peran Pusat Kurikulum dalam advokasi pengembangan kurikulum di daerah; pengembangan jaringan kurikulum antar daerah; penjaminan mutu bahan ajar; fungsi dan peran Pusat Perbukuan Nasional. Di samping itu, perlu dielaborasi pembelajaran berbasis nilai dan kompetensi; pembelajaran berbasis jaringan; konsep pembelajaran demokratis; pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; paradigma operasional *learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together*. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah elaborasi kurikulum substansi nasional wajib: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa; kurikulum sekolah internasional di Indonesia; dan fungsi lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan.
6. *Upaya untuk mengelaborasi lebih jauh* adalah operasionalisasi konsep penilaian berbasis nilai dan kompetensi; penilaian berbasis portofolio; penilaian berbasis sekolah; konsep dan strategi ujian sekolah; ujian nasional; uji kompetensi; ujian *on-line*; ujian kesetaraan; akreditasi sekolah/perguruan tinggi; dan peran pendidik dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
7. *Kemauan dan kebijakan politik yang lebih nyata dari Pemerintah* untuk meningkatkan profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; paradigma pendidikan prajabatan dan pendidikan dalam jabatan untuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; kedudukan dan fungsi lembaga pendidikan tenaga kependidikan; konsep dan strategi penempatan, pembinaan, dan rotasi tenaga pendidik lintas daerah dalam konteks nasional; fungsi dan peran lembaga penjaminan mutu pendidikan daerah dalam pembinaan dan peningkatan kemampuan profesional guru secara berkelanjutan.
8. *Kebijakan nasional yang sinergis* untuk mendudukkan fungsi dan peran pendidikan kedinasan dalam konteks pendidikan nasional; kelembagaan pendidikan kedinasan; program pendidikan

kedinasan; ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan lain pada pendidikan kedinasan; kemitraan pendidikan kedinasan dengan pendidikan umum dan prospek pendidikan kedinasan dalam konteks nasional dan global

9. *Perangkat Peraturan Pemerintah yang lebih aspiratif*; kerangka yang koheren mengenai: desentralisasi pendidikan dalam rangka negara kesatuan RI; kedudukan dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional; perencanaan pendidikan nasional dan daerah; pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pemindahan guru; pengembangan sekolah kejuruan; pengembangan sekolah unggulan/bertarap internasional di daerah; peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Daerah; manajemen penjaminan mutu pendidikan nasional; kerjasama luar negeri dan kerjasama antar daerah; dan internasionalisasi/globalisasi pendidikan.
10. *Konsep dan strategi pendanaan* pendidikan yang mampu menopang upaya pemerataan pendidikan yang bermutu, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan, untuk menopang upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan sehingga realisasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD terjamin efisiensi dan akuntabilitasnya.; dan
11. *Kajian yang komprehensif dan mendalam* tentang kebijakan pemisahan pengelolaan kebudayaan dengan pendidikan nasional khususnya bila dikaitkan dengan prinsip pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagaimana yang dimaktub dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Kerangka Dasar Kebijakan

Kata PEMULIHAN digunakan dalam kerangka pikir ini untuk menegaskan bahwa upaya pendidikan yang tengah dibangkitkan dan menjadi perhatian kuat bangsa Indonesia saat ini harus mampu membangun perilaku bangsa yang sehat dan memperbaiki serta mengubah perilaku “sakit” yang tidak menguntungkan kehidupan bangsa, sehingga terwujud masyarakat yang waras (*sane society*)

sebagai masyarakat yang demokratis, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan berdaya tahan. Pemulihan tidak semata-mata menyangkut tataran praksis melainkan mulai dari pemulihan *mind set* dan pemkanaan pendidikan yang menjadi dasar penentuan kebijakan nasional pendidikan.

1. Pemulihan Arah Pendidikan

Telah banyak upaya dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dari periode ke periode pemerintahan dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional, mulai dari perangkat infrastruktur aspek legal sampai kepada pemenuhan anggaran yang ditetapkan UUD 1945. Komitmen yang ditunjukkan sudah amat tinggi, capaian kuantitatif banyak digelar dan menjadi kebanggaan, namun persoalan kehidupan demokrasi, karakter dan peradaban, serta kemandirian bangsa dalam percaturan hidup antar bangsa masih mencuat sebagai isu nasional yang belum terselesaikan dalam pembangunan bangsa ini. Dimanakah letak persoalannya? Banyak tentu variabel terkait di dalamnya, namun jika dilihat dari aspek legal pendidikan, UU No. 20/2003 sudah mengandung amanat yang sangat utuh untuk penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang demokratis, berkarakter kuat, dan berjiwa mandiri berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya bangsa.

Persoalan terletak dalam implementasi UU SisDikNas yang belum dijiwai secara utuh dan konsisten oleh kaidah-kaidah pendidikan sebagai proses mendewasakan dan memanusiakan manusia. Persoalan ini adalah persoalan filosofis yang menjadi dasar arah penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan harus dilandasi oleh filosofi yang jelas, pendidikan bukan semata-mata persoalan sosial, politik, ekonomi, dan hukum melainkan persoalan perkembangan manusia yang ada dalam konteks budaya sebagai sebuah sistem yang terbuka dan harus didekati dari sudut kemanusiaan. Praktek penyelenggaraan pendidikan perlu lebih diwujudkan sebagai keutuhan proses memanusiakan manusia.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah pemulihan *mind set* pendidikan dalam menjiwai UU SisDikNas, yang dituangkan ke dalam *blue print* utuh penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang memetakan keterpaduan

pengembangan karakter dan kepribadian bangsa dengan penguasaan sains, teknologi, dan seni yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa disertai pengembangan, penguatan, dan perbaikan nilai-nilai kultural dan kebangsaan yang berorientasi kepada masa depan bangsa sebagai bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berdaya tahan hidup yang kuat.

2. Pemulihan Makna Pendidikan Nasional

Esensi pendidikan yang diamanatkan pada UU No. 20/2003 tentang SisDikNas telah mengubah paradigma pendidikan yang digariskan pada UU No. 2/1989, dari pendidikan sebagai proses membentuk manusia, sebagai paradigma sepihak, ke proses memfasilitasi perkembangan peserta didik, sebagai paradigma demokratis. Pendidikan adalah proses demokratisasi, mengembangkan kemampuan hidup dalam keragaman. Esensi Pendidikan Nasional yang diamanatkan UU bukanlah pendidikan asing yang diterapkan di Indonesia, melainkan pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia namun tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu ditegaskan dalam UU bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk untuk membangun kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Makna yang terkandung adalah, watak dan peradaban bangsa menjadi **tujuan eksistensial pendidikan**, yang melandasi pencerdasan kehidupan bangsa sebagai **tujuan kolektif**, melalui pengembangan potensi peserta didik sebagai **tujuan individual**. Tiga tataran tujuan ini harus dicapai secara utuh melalui proses pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang.

Persoalan terletak dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang masih mengandung ketimpangan dan memerlukan pengutuhan dan penyeimbangan antara pencapaian tujuan-tujuan individual dengan proses pencapaian tujuan kolektif dan proses pencapaian tujuan eksistensial, yang harus dibangun secara kokoh.

Dalam jangka panjang pencapaian tujuan individual yang tidak diimbangi dengan strategi pencapaian tujuan kolektif dan eksistensial amat berbahaya karena bisa menghasilkan manusia pintar tapi egoistik dan tidak peduli terhadap kehidupan bangsa. Tujuan eksistensial dan tujuan kolektif bukanlah sebuah agregasi dari tujuan-tujuan individual, sebagai prestasi yang diukur melalui ujian, melainkan ada perekat kultural yang harus dikembangkan, diperkuat, dan diubah serta diperbaiki melalui upaya pendidikan.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah memulihkan keutuhan proses pembelajaran yang mendidik sebagai wahana pengembangan kehidupan demokratis, karakter dan kemandirian sebagai *soft skills*, serta penguasaan sains, teknologi, dan seni sebagai *hards skills*. Pemulihan pembelajaran yang mendidik ini memerlukan revitalisasi **manajemen nasional** pendidikan yang mampu merevitalisasi *mind set* dan profesionalisme pendidik dan para pemimpin pendidikan.

3. Pemulihan *Mind Set* Pendidikan Dalam Menjawai Mutu Pendidikan

Mind set pendidikan sebagai keutuhan proses memanusiakan manusia telah ditegaskan dalam UU No. 20/2003 Pasal 1 (1) bahwa: "*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara*". Mutu pendidikan mesti dilihat dari perspektif keutuhan mind set ini harus terwujud dan tercermin dalam keutuhan pemahaman dan perlakuan secara tepat kepada peserta didik, sistem manajemen yang konsisten dengan mind set pendidikan, sumber daya yang relevan dan fungsional, sistem evaluasi yang membangun kejujuran dan objektivitas.

Persoalan muncul yang mungkin disebabkan oleh ekspektasi standar dan target ukuran kuantitatif yang bisa mendorong terjadinya simplifikasi proses pendidikan yang menumbuhkan perilaku instan, yang dalam jangka panjang bisa menimbulkan kerawanan dan kerapuhan kehidupan bangsa.

Strategi upaya yang perlu dibangun adalah memulihkan *mind set* pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat pendidikan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang mendidik (*instruction that educate*) yakni proses pembelajaran yang mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan yang sekaligus diringi pengembangan karakter *kerja keras, kejujuran, dan peduli mutu*, dalam mencapai tujuan utuh pendidikan, disertai dengan sistem evaluasi yang membangun kejujuran.

4. Profesionalisasi dan Sertifikasi Pendidik

Adalah upaya dan perhatian yang luar biasa diberikan Pemerintah saat ini untuk meningkatkan mutu, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik melalui proses sertifikasi pendidik. Muara dari semua upaya besar ini adalah terwujudnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa ini yang tampak mulai dari arah kebijakan, *mind set*, sistem manajemen, sumber daya, proses dan hasil capaian **tujuan utuh** pendidikan.

Persoalan yang perlu diantisipasi adalah manajemen ketenagaan pendidikan yang mampu memberikan jaminan bahwa upaya besar Pemerintah yang tengah dilakukan ini akan membawa perbaikan mutu pendidikan. Jika jaminan ini tidak ada maka upaya besar itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah dan lembaga pendidikan itu sendiri.

Strategi upaya yang harus dikembangkan adalah menata sistem manajemen nasional ketenagaan, dengan menekankan kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah yang telah diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah. Penataan manajemen ketenagaan ini harus seiring dengan pemulihan *mind set* pendidikan pada seluruh pejabat pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membina secara berkelanjutan kinerja pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

5. Penguatan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

LPTK adalah Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab mendidik calon pendidik profesional, mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Sebagai perguruan tinggi, seperti juga perguruan tinggi lainnya, LPTK mengemban tanggung

jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. LPTK adalah perguruan tinggi yang secara langsung berhubungan dengan dunia pendidikan baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal. LPTK adalah perguruan tinggi yang harus mampu menjamin kebermutuan pendidik yang dihasilkan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan bermutu.

Persoalan yang tampak bahwa LPTK masih merupakan perguruan tinggi yang belum berstandar tinggi, apalagi jika diukur dari standar *world class university*. Internasionalisasi pendidikan atau pendidikan berstandar internasional yang sedang dikembangkan, pendidikan vokasional yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja terdidik untuk pasar kerja internasional diyakini memerlukan guru yang berstandar internasional, harus dididik dan disiapkan oleh LPTK yang memiliki reputasi dan standar internasional.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah revitalisasi LPTK yang mencakup penyehatan organisasi, penguatan kapasitas, penguatan keilmuan, internasionalisasi, sumber daya, dan pendanaan pendidikan tenaga pendidik.

6. Internasionalisasi Pendidikan

Internasionalisasi pendidikan yang diisyaratkan oleh UU No. 20/2003 ialah pengembangan pendidikan berstandar internasional. Sesungguhnya tidak ada satu rujukan pasti yang disebut dengan pendidikan berstandar internasional, tetapi yang harus dicapai adalah pengakuan secara internasional terhadap mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Oleh karena itu esensi internasionalisasi pendidikan atau pendidikan berstandar internasional adalah penguatan dan pengembangan seluruh potensi untuk memperoleh pengakuan internasional.

Persoalan yang harus diantisipasi ialah bahwa pendidikan berstandar internasional tidak boleh menjadi eksklusif dan menggunakan kurikulum asing di sekolah. Pendidikan internasional tetap pendidikan yang berbasis pada nilai budaya dan jati diri bangsa, tetapi nilai-nilai budaya itu dikembangkan, diperbaiki, dan diperkuat seiring dengan penguatan sains, teknologi, dan seni yang menumbuhkan daya saing dan pengakuan internasional.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah memperkuat sumber daya pendidikan, fasilitas, tenaga, pembiayaan, yang mampu memenuhi standar layanan tinggi dan bermutu. Standar layanan tinggi dan bermutu ini hendaknya tidak menjadi eksklusif untuk sekelompok peserta didik tertentu melainkan harus menyentuh seluruh peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Ini mutlak diupayakan sehingga terjadi perubahan kultur pendidikan yang berorientasi standar mutu tinggi yang bisa menarik peserta didik asing menempuh pendidikan di Indonesia, dan diperolehnya rekognisi internasional terhadap mutu pendidikan di Indonesia.

7. Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pendidikan Untuk Semua (*Education for All*) adalah hal mendesak bagi Indonesia karena ketidak merataan akses, kesempatan, dan mutu serta masih terbatasnya diversifikasi program dan layanan pendidikan. EFA adalah pendidikan yang diselenggarakan secara inklusif dan demokratis, dan oleh karena itu EFA memiliki nilai politis dalam percaturan antar bangsa. EFA harus mewujudkan diversifikasi layanan karena keberagaman kemampuan peserta didik, namun tak boleh menjadi eksklusif dan menjauhkan peserta didik dari akar budaya bangsa, melainkan harus menjadi “miniatur” masyarakat inklusi yang sesungguhnya. Penuntasan Dikdas 9 tahun harus segera diikuti dengan Pendidikan Dasar 12 Tahun.

Persoalan yang harus diantisipasi adalah “keterjebakan” EFA ke dalam diversifikasi eksklusif, seperti pendidikan anak berbakat karena mungkin orientasi target-target pengakuan internasional, yang bisa menceraibut peserta didik dari akar budaya dan membentuk perilaku instant, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar 12 tahun.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan adalah kebijakan membangun dan menata kontinuitas dan interelasi program pendidikan antar jenjang dalam keutuhan sistem, yang mengandung daya adaptabilitas dan fleksibilitas tinggi terhadap keragaman peserta didik. Untuk itu diperlukan sistem manajemen pendidikan yang secara kuat mendorong akuntabilitas setiap satuan pendidikan dalam persaingan yang terbuka dan jujur. Masyarakat luas perlu dibelajarkan agar memahami dengan benar

masalah akuntabilitas dan kejujuran persaingan di dalam proses pendidikan. Upaya ini mutlak dibarengi dengan pemerataan mutu pendidikan yang harus difahami dan diimplementasikan secara tepat oleh Pemerintah Daerah.

8. Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan berangkat dari keyakinan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara, Falsafah Negara, dan *Way of life* bangsa Indonesia tetap mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan perkembangan berbangsa dan bernegara, dan memiliki landasan eksistensial yang kokoh baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pendidikan Pancasila adalah sebuah proses memfasilitasi dan membawa bangsa, (melalui proses-proses individual maupun kelompok), untuk mengetahui, memahami, menginternalisasi, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua tahapan yang disebutkan menghendaki proses interaksi, melalui sebuah proses pendidikan yang berlangsung dalam berbagai setting dan tataran (*multi level, multi setting and multi chanel*). Pendidikan Pancasila akan harus terjadi dimana-mana, bersifat *ubiquitous*, berlangsung dalam konteks dan beranjak dari kondisi objektif dan eksistensial kehidupan masyarakat yang memungkinkan terjadinya sebuah proses asimilasi dan internalisasi nilai yang akan menjadi kekuatan internal dalam diri, kelompok, dan masyarakat. Pendekatan-pendekatan pendidikan perlu dikaji untuk menghasilkan titik optimal penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan.

Persoalan yang tampak ialah bahwa di tengah-tengah keyakinan sebagaimana disebutkan dirasakan terjadi pengenduran terhadap pemahaman Pancasila sebagai dasar, falsafah, ideologi, dan way of life bangsa. Fenomena semacam itu dirasakan dan disaksikan baik dalam praktek pendidikan, kehidupan bermasyarakat, dan bahkan mungkin dalam praktek berpolitik.

Strategi upaya yang perlu dikembangkan ialah paradigma kajian ilmiah, filosofis, kultural, dan pedagogis-andragogis dengan berorientasi kepada prinsip belajar sepanjang hayat, menjauhkan

perspektif dogmatis dalam memahami Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang terbuka, perangkat nilai yang bisa dipelajari dan diinternalisasi di dalam perubahan-perubahan perilaku—sebagai sebuah proses pembelajaran, diuji dan diverifikasi secara empirik melalui riset dan pengembangan dalam konteks keragaman kultur dan kehidupan yang mendunia (global), dimaknai secara dinamis dengan daya adaptabilitas tinggi di dalam kehidupan nyata yang mendorong masyarakat untuk belajar sepanjang hayat sebagai sebuah komunitas belajar (*learning society*).

9. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang tak dapat diabaikan dalam membangun kesadaran masyarakat luas sebagai warga negara yang produktif dan demokratis, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, peningkatan dan penyesuaian kecakapan hidup, kewirausahaan dan pendidikan politik. Pendidikan nonformal sebagai subsistem Pendidikan Nasional, baik secara kelembagaan maupun manajemen.

Persoalan yang dihadapi bahwa pendidikan nonformal masih lebih berwujud sebatas penyelenggaraan kursus, belum menggambarkan sebuah subsistem pendidikan, dan belum menyentuh proses pemberdayaan kehidupan masyarakat secara utuh, dan mutu serta ketersediaan sumber daya pendidik nonformal yang masih memerlukan perhatian khusus.

Strategi upaya yang bisa dikembangkan adalah melakukan *community empowering and sustainability development*, sebuah model pembangunan masyarakat yang berbasis pendidikan dan kultur setempat, yang didalamnya bisa ditumbuhkan dan dibelajarkan hal-hal kehidupan demokrasi, politik, kecakapan hidup, kekuatan ekonomi pedesaan untuk menekan eksploitasi ekonomi perkotaan, berbasis kearifan lokal untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan guna membangun ketahanan hidup (*sustainable livelihood*).

10. Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan

Kebudayaan memberikan makna unik bagi kehidupan bangsa, yang harus diwariskan kepada generasi berikut, yang memungkinkan bangsa itu memenuhi kebutuhan dan memperoleh

ketahanan hidup, mencapai keterwujudan diri sebagai makhluk, mencapai kebahagiaan dan mengisi makna hidup. Kebudayaan sebagai proses dan sebagai hasil, dan pendidikan nasional adalah proses pembudayaan manusia Indonesia di dalam setting budaya nasional, sebagai kebudayaan puncak dari kebudayaan-kebudayaan daerah atau lokal. Pendidikan membangun daya adaptabilitas budaya dan dalam hal tertentu pendidikan berfungsi sebagai terapi budaya/kultural. Kebudayaan tidak semata-mata sebuah hasil melainkan sebuah proses.

Persoalan yang tampak ialah bahwa pengembangan kebudayaan lebih berorientasi pada hasil, sebagai sebuah komoditi yang diukur dari nilai jual sehingga terjadi simplifikasi makna dan apresiasi budaya, dan kurang menekankan kepada orientasi proses yang menekankan kepada pembentukan karakter, nilai kejuangan, patriotisme, dan cinta tanah air.

Strategi upaya yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang pemisahan kebudayaan dari pendidikan secara kelembagaan dan membangun penyelenggaraan pendidikan sebagai proses pembudayaan. Penguatan budaya dan seni termasuk bahasa daerah adalah kekuatan lokal yang harus diangkat dan menjadi program unggulan pendidikan yang dapat memperkokoh jati diri bangsa di dalam memasuki proses internasionalisasi pendidikan.

11. Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Ipteks

Pengembangan dan penguatan karakter harus dibangun dalam semua jenjang pendidikan, dan harus diperkuat dengan pengembangan dan penguatan sains, teknologi, dan seni berbasis riset di pendidikan tinggi. Penguatan riset di pendidikan tinggi adalah sebuah keniscayaan, oleh karena itu mendorong dan memfasilitasi para dosen melakukan riset dan publikasi harus menjadi skala prioritas setelah penyelenggaraan layanan pendidikan. Pendidikan Tinggi memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berorientasi pada pengembangan keilmuan dan riset, yang berbeda dari dunia persekolahan. Riset dan pengembangan merupakan ciri utama dari kekuatan pendidikan tinggi untuk membangun *knowledge society* yang memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Pengembangan kelompok dosen peneliti merupakan satu kebutuhan untuk mendukung kepentingan yang disebutkan. Beberapa *persoalan*

mendasar dalam membangun pendidikan tinggi dan *strategi* yang perlu dikembangkan adalah terutama menyangkut pengokohan riset dan pengembangan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan kehidupan bangsa, internasionalisasi pendidikan, penguatan sumber daya, akselerasi otonomi, dan penjaminan mutu. Penegasan keunikan fokus pendidikan dasar dan menengah dan keunikan fokus pendidikan tinggi membawa implikasi perlunya dukungan *kekhususan sistem manajemen* bagi kedua kelompok jenjang pendidikan yang disebutkan.

B. Strategi Implementasi

1. Pemulihan *mind set* utuh pendidikan dalam jiwa UU No. 20/2003 diiringi dengan sinergi semua regulasi ke dalam *mind set* utuh yang disebutkan. Pemulihan harus terjadi pada semua lapisan masyarakat pendidikan mulai dari para pengambil kebijakan di semua jenjang pemerintahan sampai kepada para pendidik yang berada di medan terdepan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan upaya mewujudkan *mind set* ke dalam perilaku nyata tindakan pendidikan.
2. Road map, kebijakan dan program untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa dalam kerangka *mind set* utuh pendidikan.
3. Diagnosis, perbaikan, dan “terapi” penyelenggaraan pendidikan dalam koridor *mind set* utuh pendidikan.
4. Standarisasi dan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan
5. Pemulihan dan penguatan daya adaptabilitas sistem penyelenggaraan pendidikan

CURRICULUM VITAE

Sunaryo Kartadinata, Prof. Dr.

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudhi 229
Telp: 062-22-2013158, Fax: 062-22-2013651
Bandung, Indonesia
e-mail: sunaryo@upi.edu

Tempat/Tgl Lahir : Ciamis, 21 Maret 1950
Alamat : Jalan Patrol II No. 68 Baleendah
Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Istri : Hj. Euis Misyeti
Nama Anak : 1. Linna Nurwulan Apriany
2. Irvan Aidil Fitry Sunaryo
3. Imam Nugraha Albania

PENDIDIKAN

1988 Doktor IKIP Bandung, Bandung, Bimbingan dan
Konseling.
1986 Sandwich Program, University of New York at
Albany.
1983 Master IKIP Bandung, Bandung, Bimbingan dan
Konseling.
1976 Sarjana IKIP Bandung, Bandung, Bimbingan dan
Konseling.

JABATAN di UPI

2005 – saat ini Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
1996 – 2005 Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum
dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia.
1996 – saat ini Profesor/Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Pendidikan Indonesia.

1995 – 1996	Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Sekolah Pasca Sarjana IKIP Bandung.
1988 – 1995	Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.
1980	Sekretaris Jurusan PPB FIP IKIP Bandung.

JABATAN KEORGANISASIAN dan KEMITRAAN

2007	Dewan Kehormatan KONI Jawa Barat.
2006 – saat ini	Ketua Umum Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Barat.
2006 - saat ini	Research Fellow, Centre for Research on International Cooperation of Education Development (CRICED), University of Tsukuba, Japan.
2005 – saat ini	Ketua Majelis Eksekutif Asosiasi LPTK Indonesia.
2005 – saat ini	Ketua II Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).
2002 – saat ini	President of Indonesian Society for Special Needs Education.
2001 – saat ini	Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).
2001 – saat ini	Member of Asia Region for Career Development (ARCD). Member of International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG).
1994 - 1996	Konsultan pada Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

PENGHARGAAN

2009	Penganugerahan Polisi Kehormatan (<i>Honorary Police</i>) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Wilayah Priangan.
------	---

2003	Satyalancana Karyasatya dari Presiden Republik Indonesia.
1998	Satyalancana Karyasatya dari Presiden Republik Indonesia.
1995	Karya Bhakti Satya dari Rektor IKIP Bandung.
1990	Satyalancana Dwidyasistha dari Kepala Staf Angkatan Darat.
1990	Satyalancana Dwidyasistha dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

KERJA TIM

2009	Koordinator Penyelenggara Ujian Nasional (UN), SMU/MANS Propinsi Jawa Barat
2008 – saat ini	Konsorsium sertifikasi guru, Depdiknas.
2008	Ketua Tim Ahli Pengembang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Konselor Indonesia, BSNP.
2009	Ketua Tim Pemantau Independen Ujian Nasional (UN) Propinsi Jawa Barat
2008	Ketua Tim Pemantau Independen Ujian Nasional (UN) Propinsi Jawa Barat
2007	Ketua Tim Pemantau Independen Ujian Nasional (UN) Propinsi Jawa Barat
2007 – saat ini	Ketua Sertifikasi Guru Rayon X Jawa Barat
2007	Ketua Tim Pengembang Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal, Ditjen Dikti.
2001 - 2003	Principal Investigator: Pengembangan Perangkat Lunak Analisis Tugas Perkembangan Siswa dalam Peningkatan Mutu dan Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah.
1996 - 1999	Principal Investigator: Quality Improvement and Management System Development of School Guidance and Counseling Services.

- Nov.1993 –
Febr.1994 Chairman of the Team of Comparative Study and Intensive Consultation on the Curriculum Development of D-II Primary Teacher Education, Univ. of Houston and OSU, USA.
- 1993 - 1995 Chairman of Curriculum Developer Team of D-II Primary Teacher Education Program, Directorate General of Higher Education.

KARYA ILMIAH

Makalah yang Disajikan

- Mei 2009 *Strategies in Improving Teacher Quality in Indonesia*, disajikan pada Asian Roundtable of Presidents of Universities of Education, The Hongkong Institute of Education.
- 2009 *Paradigma Mutu Pendidikan dalam Bingkai Sistem Pendidikan Nasional*, Banda Aceh.
- 2008 *Institutional Governance Requirements to Produce Dedicated Teacher*, Ditjen Dikti.
- 2008 *Pembaharuan Pendidikan Guru di Indonesia*, UPSI Malaysia.
- 2005 Arah dan tantangan Bimbingan dan Konseling Profesional: Historik-Futuristik.
- Mei 2003 *Bimbingan dan Konseling Perkembangan: Pendekatan Alternatif bagi Pengembangan Mutu dan Sistem Manajemen Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah*. Jurnal Bimbingan dan Konseling, Volume VI. No. 11.
- Maret 2002 *Current Problems, Issues and Recent Progress in Special Education in Indonesia*. Symposium on International Cooperation for Education in Developing Countries, Educational Services for Children with Special Needs, University of Tsukuba, Japan.

- 1999 *Quality Improvement and Management System Development of Guidance and Counseling Services.* Jurnal Ilmu Pendidikan, Dec. 1999, vol.6: 413-423.
- 1996 *Landasan-Landasan Pendidikan Sekolah Dasar.* DGHE.
- 1996 *Kerangka Kerja Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan: Pendekatan Ekologis Sebagai Suatu Alternatif.* Disajikan pada pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam ilmu pendidikan pada jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan fakultas ilmu pendidikan IKIP Bandung.
- 1995 *Pengembangan Kemampuan Generik Melalui Rumpun MKDK dalam Kurikulum D-II PGSD.* Jakarta; Ditjen Dikti.
- 1994 *Development of D-II Generic Courses: Rationale for Course Selection and Content Choice.* Seminar on Curriculum Developers Program Ohio USA.
- 1994 *Strategi Mengajar dalam Mengoptimalkan Situasi Belajar di Sekolah Dasar.* Seminar PGRI, Majalengka.
- 1993 *Dimensi Psikologis dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Sekolah Dasar.* Jakarta; Ditjen Dikti.
- 1993 *Pemahaman Karakteristik Peserta Didik yang Memiliki Kemampuan dan Kecerdasan Luar Biasa.* Seminar Jurusan PLB, FIP, IKIP Bandung.
- 1992 *Model Program Pendidikan Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kemampuan dan Kecerdasan Luar Biasa.*

- 1991 *Tantangan, Peluang, dan Arah Peningkatan Unjuk Kerja Profesional Petugas Bimbingan Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Makalah Sumbangan Dalam Konvensi dan Kongres IPB Padang.
- 1991 *Personal and Social Need Problems of Primary School Pupil and Their Implications on The Guidance Services*. An International Conference on Education In Asia and The Pacific: Bandung.
- 1989 *Kualifikasi Profesional Petugas Bimbingan Indonesia (Kajian Psikologis)*. Konvensi Dan Kongres IPB, Denpasar.

PENELITIAN

- 2001 - 2003 *Pengembangan Perangkat Lunak Analisis Tugas Perkembangan Siswa dalam Upaya Peningkatan Mutu Layanan dan Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*.
- 1996 - 2000 *Quality Improvement and Management System Development of School Guidance And Counseling Services*. Proyek URGE. Ketua Tim.
- 1995 *Studi Awal Tentang Peningkatan Mutu dan Sistem Manajemen Layanan Bimbingan di Sekolah Dasar*. OPF IKIP Bandung: Penelitian Mandiri.
- 1995 *Upaya Penigkatan Kemampuan Guru Dalam Melakukan Evaluasi Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Di Daerah Kabupaten Garut*. *Action Research, P2MTK PGSD*. Ditjen Dikti: Tim Penelitian.
- 1995 *Pengembangan Sistem Layanan Pendidikan Anak Berbakat di Sekolah Dasar*. Penelitian Mandiri.
- 1994 *Studi Manajemen Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Indonesia*. Ditdikmenum: Tim Peneliti.

- 1994 *Studi Tentang Pengembangan Model Pengelolaan Proses Belajar Mengajar yang Mendukung Perkembangan dan Kesiapan Intelektual, Personal, dan Sosial Murid Sekolah Dasar untuk Memasuki Pendidikan Dasar 9 Tahun.* Hibah Bersaing P4M Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti: Ketua Tim.
- 1993 *Studi Tentang Mutu Pelaksanaan Bimbingan Karir di SMA-SMA Se-Jawa Barat.* Hibah Bersaing P4M Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti: Ketua Tim.
- 1993 *Tingkat Pemahaman Guru Tentang Konsep Bimbingan dan Penerapan Dalam Proses Belajar Mengajar (Studi Tindak Lanjut Pengabdian Pada Masyarakat).* Ketua Tim.
- 1990 *Evaluasi Pelaksanaan Sistem SKS di PTS Jawa Barat.* P4M Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti: Ketua Tim.
- 1989 *Profil Guru Sekolah Dasar Menjelang Tahun 2000.* Proyek P2T IKIP Bandung: Tim Peneliti.

ARTIKEL

- 1999 *Quality Improvement and Management System Development of School Guidance And Counseling Services.* Jurnal Ilmu Pendidikan.
- 1994 *Pengembangan Sistem Manajemen Proses Belajar Mengajar yang Kondusif Untuk Meningkatkan Kesiapan, Intelektual, Personal, dan Sosial Murid Sekolah Dasar Memasuki Pendidikan Dasar 9 Tahun.* Mimbar Penelitian IKIP Bandung.
- 1993 *Mutu Layanan Bimbingan Karir Di SMA Di Jawa Barat.* Mimbar Penelitian IKIP Bandung.
- 1992 *Pengembangan Kesiapan Murid Sekolah Dasar untuk Memasuki Pendidikan Dasar 9 tahun.* Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah, (Mendapat Penghargaan).

- 1992 *Pengembangan Kesiapan Murid Sekolah Dasar Untuk Memasuki Pendidikan Dasar 9 Tahun.* Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah: (Publikasi ini memperoleh penghargaan dari IKIP Bandung).
- 1992 *Beberapa Catatan Tentang Sistem Evaluasi dalam Pendidikan Dasar 9 Tahun".* Jurnal Pendidikan Dasar 9 Tahun. Jurnal Pendidikan Ikatan Alumni FIP IKIP Bandung.
- 1992 Menyiapkan Guru Sekolah Dasar Yang Profesional Melalui Program D-II PGSD. Mingguan Mitra.
- 1992 *Putus Sekolah dan Mengulang Kelas di Sekolah Dasar.* Mingguan Mitra.
- 1987 *Hubungan Keyakinan Takrasional Dengan Tingkat Kecemasan: Studi Awal ke Arah Pengujian Validitas Teori A-B-C Dalam Konseling Rasional Emotif.* Rampai Psikologi Pendidikan dan Bimbingan.

BUKU dan BAB

- 2007 *Teori Bimbingan dan Konseling.* dalam buku "Rujukan Filsafat, Teori, dan Praksis Ilmu Pendidikan". UPI.
- 2007 *Profesi Konselor di dalam Sistem Pendidikan Nasional: Telaah Akademik-Yuridis.* dalam buku "Rujukan Filsafat, Teori, dan Praksis Ilmu Pendidikan". UPI.
- 1996 *Landasan-Landasan Pendidikan Sekolah Dasar.* Depdikbud, Ditjen Dikti, P3GSD. (Penulis)
- 1995 *Masalah Psikologis Anak Luar Biasa.* Depdikbud, Ditjen Dikti. (Penilai Dan Kontributor)
- 1992 *Teknik Pengukuran dan Penilaian Hasil Belajar.* (untuk PGSD). (Penulis)
- 1988 *Metode Riset Sosial, Suatu Pengantar.* (Penulis)